

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Bambang Sunggono, 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chaerudin, dkk, 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Ermansjah Djaja, 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Evi Hartanti, 2008. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Frans Winata, 2009. *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Gunawan A Tauda, 2012. *Komisi Negara Independen*, Yogyakarta:Genta Press.
- Jimmy Asshiddiqie, 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pudi Rahardi, 2014. *Hukum Kepolisian (Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Surabaya: Laksbang Grafika
- Riawan Tjandra, 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Saldi Isra, 2009. *Catatan Hukum Saldi Isra Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Yunus Husein, 2008. *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima
- Zainal Arifin Mochtar, 2016. *Lembaga Negara Independen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zulkarnain dkk, 2007. *Komisi Pengawas Penegak Hukum*. Jakarta, Yappika.

II. Peraturan Perundang-Undangan

- Ketetapan MPR No. IV/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *js* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

III. Jurnal, Makalah, dan Artikel

Rizky Argama, *Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ida Bagus Surya Darmajaya, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Imam Subarkah, *Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Jurnal Bank Indonesia Volume 10/No.1/Januari-April 2012 ISSN 1693-3265

Toetik Rahayuningsih, *Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, *Laporan Tahunan 2015*, Jakarta. 2015

Anastasia Sumakul, *Hubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan Kejaksaaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi*. Vol.I/No.4/Okt-Des/2012

Muhammad Febriansyah, *Peran Kompolnas dalam mengatasi dugaan penyalahgunaan wewenang tugas di Kepolisian*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, Makassar, 2015, hlm. 27-28

IV. Website:

<http://pandji-indonesia.com>.

<http://www.dpr.go.id>.

<http://www.kompasiana.com>.

<http://www.hukumonline.com>.

http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Kepolisian_Nasional.

<http://www.suara.com/>

